

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penilaian responden mengenai variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas penertiban bangunan liar (Studi Pada Wilayah Kerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Kota Bandung) yang dinilai berdasarkan tiap – tiap indikator, bahwasannya berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi maka terdapat 16 (enam belas) indikator pada variabel implementasi kebijakan yang memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas penertiban bangunan liar.

Dari hasil penelitian ditemukan masalah – masalah seperti kurangnya sosialisasi terkait penggunaan asset tanah PT KAI terhadap masyarakat, kurangnya kejelasan prosedur penggunaan asset tanah PT KAI kepada masyarakat, tidak tersedianya anggaran penertiban bangunan liar yang menyeluruh oleh PT KAI, tidak adanya hitam diatas putih sebagai bentuk perjanjian yang legal antara masyarakat dan PT KAI, tidak adanya penyusunan dan pelaporan secara berkala terkait pendataan asset PT KAI yang digunakan oleh masyarakat.

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan teruji secara empirik, karena variabel implementasi kebijakan memberikan pengaruh terhadap

efektivitas penertiban bangunan liar(Studi Kasus Pada Wilayah Kerja PT KAI DAOP II Kota Bandung). Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh faktor lain yang tidak diteliti selain variabel implementasi kebijakan yang turut mempengaruhi efektivitas penertiban bangunan liar(Studi Kasus Pada Wilayah Kerja PT KAI DAOP II Kota Bandung)

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Dengan disusunnya penelitian ini, diharapkan peneliti lainnya dapat melanjutkan penelitian dengan meneliti lebih lanjut variabel yang mempengaruhi efektivitas penertiban bangunan liar(Studi Kasus Pada Wilayah Kerja PT KAI DAOP II Kota Bandung). Diharapkan untuk penelitian selanjutnya peneliti tidak hanya menggunakan data primer untuk diteliti, tetapi juga melakukan observasi dan wawancara agar hasil penelitian lebih komprehensif. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel – variabel lain yang turut mempengaruhi efektivitas penertiban bangunan liar(Studi Kasus Pada Wilayah Kerja PT KAI DAOP II Kota Bandung) agar hasil penelitian dapat dilihat dengan sudut pandang yang lebih luas. Adapun variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap efektivitas penertiban bangunan liar(Studi Kasus Pada Wilayah Kerja PT KAI DAOP II Kota Bandung) yang direkomendasikan peneliti adalah variabel komunikasi dan prosedural. Variabel komunikasi disinyalir memiliki pengaruh terhadap efektivitas penertiban bangunan liar karena pada penelitian ini salah satu masalah krusial adalah masalah

koordinasi antara PT KAI DAOP II dengan masyarakat terdapat banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui kejelasan mengenai penggunaan aset tanah. Sehingga adanya ketidaksesuaian terhadap kepemilikan yang legal atas tanah yang ditempati. Variabel prosedural memiliki pengaruh terhadap efektivitas penertiban bangunan liar karena pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa kepastian prosedur dapat mempengaruhi kinerja aparat dalam megimplementasikan kebijakan terkait penertiban bangunan liar.

5.2.2 Saran Praktis

Dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan terhadap efektivitas penertiban bangunan liar(Studi Kasus Pada Wilayah Kerja PT KAI DAOP II Kota Bandung) peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Agar PT KAI DAOP II Kota Bandung lebih banyak mengadakan sosialisasi mengenai aturan atau kebijakan terkait penggunaan aset tanah PT KAI baik secara langsung maupun melalui media.
2. Agar PT KAI DAOP II Kota Bandung tidak mengalami kesulitan saat melaksanakan kebijakan terhadap penertiban bangunan liar yang ditempati masyarakat yang bukan haknya.
3. Agar PT KAI DAOP II Kota Bandung dapat memberikan kejelasan prosedur penguasaan aset tanah PT KAI kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami dan tidak terjadinya kesalahan pahaman antara masyarakat dan PT KAI Daop II.

4. Agar PT KAI DAOP II Bandung dapat meningkatkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan terhadap penertiban aset tanah PT KAI.
5. Agar PT KAI DAO II Bandung dapat meningkatkan profesionalisme aparat PT KAI dalam melaksanakan kebijakan.
6. Agar PT KAI dapat lebih mengembangkan potensi sarana dan prasarana yang telah sesuai dengan peruntukan aset tanah PT KAI.